

RINGKASAN

**Yulis Setiani
220510238**

**Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi
Utang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Tanah
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Takengon)**

**(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Dr. Hamdani,
S.H., LL.M)**

Penyelesaian perkara perdata khususnya sengketa wanprestasi di Indonesia diadili di Pengadilan Negeri. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Pelaksanaan mediasi tidak selalu berhasil karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan komunikasi para pihak, kehadiran pihak yang bersengketa dan peran hakim mediator dalam proses pelaksanaan mediasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa wanprestasi utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah dilakukan di Pengadilan Negeri Takengon.

Metode penelitian yang digunakan dalam permasalahan tersebut adalah yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian secara sosiologis, yakni melakukan wawancara langsung terhadap orang yang bersangkutan dengan sengketa wanprestasi utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Takengon, analisis data yang dilakukan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Takengon telah mengikuti proses penyelesaian sengketa wanprestasi sesuai dengan prosedur yang terdapat pada PERMA No 1 Tahun 2016. Pengadilan Negeri Takengon mengalami berbagai kendala yang dihadapi selama proses mediasi berlangsung sehingga dapat memengaruhi hasil mediasi, seperti ketidak hadirannya para pihak, kurangnya iktikad baik para pihak serta para pihak yang tidak dapat menurunkan egonya masing-masing. Selain itu, waktu pelaksanaan mediasi yang relatif lebih lama dibandingkan dengan Gugatan Sederhana. Oleh karena itu, sebagai solusi sejak tahun 2019 Pengadilan Negeri Takengon menerapkan sistem Gugatan Sederhana pada sengketa yang nominal jaminannya tidak melebihi Rp.500.000.00 sebagai penyelesaian sengketa wanprestasi utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah pengganti mediasi.

Penullis menyarankan untuk lebih mengutamakan proses mediasi untuk perkara wanprestasi utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah dibandingkan dengan gugatan sederhana. Hal ini dapat mempengaruhi hasil putusan dan kepuasan bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa wanprestasi utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah. Selain itu perlu adanya pemberian pengetahuan kepada para pihak dan masyarakat luas mengenai keuntungan menyelesaikan perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Takengon.

Kata kunci : Peran Mediasi, Wanprestasi, Perjanjian, Utang Piutang.

SUMMARY

Yulis Setiani
220510238

***The Role of Mediation in Resolving Breach of Contract
Disputes Involving Debt Secured by Land Certificates
(Research Study At The Takengon District Court)***

**(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Dr.
Hamdani, S.H., LL.M)**

The resolution of civil cases, particularly those involving breach of contract disputes in Indonesia, is adjudicated in the District Court. Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures, the implementation of mediation does not always result in success, as it is influenced by various factors, such as the communication skills of the parties, the presence of the disputing parties, and the role of the mediator judge in the mediation process. The purpose of this research is to examine the application of mediation as one of the processes for resolving breach of contract disputes involving debt agreements secured by land certificates at the Takengon District Court.

The research method employed is empirical juridical, utilizing a sociological approach by conducting direct interviews with individuals involved in breach of contract disputes regarding debts secured by land certificates. This research was conducted at the Takengon District Court, with data analyzed descriptively.

Based on the research findings, it is shown that the Takengon District Court has followed the dispute resolution process for breach of contract cases in accordance with the procedures set forth in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. However, obstacles encountered during the mediation process can affect the outcome of mediation. These obstacles include the absence of parties, lack of good faith, and parties' unwillingness to compromise or lower their egos. In addition, the mediation process generally takes relatively longer than the Simplified Lawsuit procedure. Therefore, as a solution since 2019, the Takengon District Court has implemented a simplified lawsuit system for disputes where the value of the security does not exceed IDR 500,000,000 as an alternative to mediation for resolving breach of contract disputes involving debt secured by land certificates.

The author is of the recommendations to prioritize mediation processes over simplified lawsuits for breach of contract cases involving debt secured by land certificates. This approach can influence the judgment outcome and increase the satisfaction of the parties in resolving such disputes. Furthermore, it is necessary to provide knowledge to the parties and the wider community regarding the benefits of resolving cases through mediation at the Takengon District Court.

Keywords: Mediation Role, Default, Agreement, Debts And Receivables